

PEMBERITAAN MENGENAI POLRI DALAM MENGHADAPI PEMILU SERENTAK 2019 PADA MEDIA SURAT KABAR ONLINE

Iswahyu Pranawukir

Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957, Jakarta.
prana1enator@gmail.com

Diajukan: 01-10-2019; Direview: 29-10-2019; Diterima: 09-12-2019;

Abstract

This article constructs the framing of Indonesia National Police (Polri) coverage in online media in order to legitimize the constitutional exercise of power. The search was limited to only 35 publications during 2018-2019, using a qualitative methodology of library research, using a constructivist paradigm, mass media theory and the study of Gamson and Modigliani's framing models. The research focuses on the key themes of the news role model or discourse that are often presented by local Indonesian-language online media, and the challenges facing by Polri public relations in the ear of digital election. There are 7 central themes, namely the neutrality of the TNI and Polri; strategy; anticipation of Polri; people's participation; vulnerability points related to hoaks, SARA, identity politics or black campaigns); performance and publication; and lastly, improving the public trust. Together with TNI, Polri is expected to maintain the solidity and neutrality in dealing with social and political problems, involving public participation to overcome the problem of constituency vulnerability and challenges ahead. The transparency of Polri's performance and good quality of its publications is fundamental in improving public trust towards Polri.

Keywords : *Indonesia National Police, simultaneous elections, online media, framing analysis, construction of reality*

Abstrak

Artikel ini mengkonstruksi pembingkai pemberitaan Polri pada media *online* untuk melegitimasi penyelenggaraan kekuasaan secara konstitusional. Penelusuran dibatasi hanya pada 35 publikasi selama 2018-2019, menggunakan metodologi kualitatif studi kepustakaan dan dokumenter dengan paradigma konstruktivis, teori media massa dan kajian teori *framing* model Gamson dan Modigliani. Penelitian berfokus pada tema kunci model pemberitaan/wacana yang kerap disuguhkan media *online* lokal berbahasa Indonesia, dan tantangan yang direspon kehumasan Polri menghadapi pemilu era demokrasi digital. Ada ada 7 tema sentral yaitu netralitas TNI dan Polri; strategi; antisipasi Polri; partisipasi masyarakat; titik kerawanan terkait masalah hoaks, SARA, politik identitas, *black campaign*); kinerja dan publikasi; dan peningkatan kepercayaan masyarakat. Bersama TNI, Polri perlu ingin menjaga soliditas dan netralitas menghadapi permasalahan sosial dan politik dengan melibatkan partisipasi masyarakat agar titik-titik kerawanan di daerah pemilihan dapat diatasi, termasuk tantangannya ke depan. Transparansi kinerja dan publikasi Polri yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Kata Kunci : *Polri, Pemilu serentak, Media Online, Analisis Framing, Konstruksi Realitas*

PENDAHULUAN

Demokrasi menjadi salah satu format sosial dan format politik yang begitu penting dan wajib dilakukan suatu negara, utamanya untuk mengelola kekuasaannya guna

mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Salah satu perwujudan demokrasi yang tengah dilakukan di Indonesia adalah Pemilihan Umum (atau biasa disingkat: Pemilu). Sejarahnya Pemilu di Indonesia berawal ketika kemerdekaan

baru saja berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun tahun 1955, ini adalah sebagai tonggak demokrasi pelaksanaan pemilu pertama kalinya (sumber: KPU@yahoo.co.id). Namun setelah berangsur dari era orde lama memasuki Orde Baru proses sosial politik pada penyelenggaraan pemilu dianggap sangatlah berbeda dari pelaksanaan pemilu sebelumnya. Di era masa Orde baru banyak pihak yang menganggap kontestasi partai peserta pemilu sangatlah otokratis dan sentralistis, dikarenakan kala itu partai hanya dibatasi menjadi fusi 3 (tiga) partai saja. Landasan penyederhanaan sistem kepartaian ini merujuk pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, barulah setelah pemilu yang dilakukan sejak tahun 1999 diemban kedalam pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya, dimana hal tersebut diawali dengan munculnya euphoria demokrasi hingga terjadi hingga saat ini. (Rita Sartika dalam prosiding kongres Pancasila IV: 2012)

Berlangsungnya demokrasi di negara ini sejarahnya memang sudah sangat panjang. Beragam kenyataan akan tantangan dan perkembangannya justru ironis telah membungkam kebebasan berdemokrasi yang juga mengancam dan mewarnai terhadap aspek-aspek masalah sosial dan politik yang berkecamuk di dalamnya. Hingga pada akhirnya dipertengahan bulan Mei ditahun 1998 era reformasi lahir serta bergulir hingga saat ini. Sejalan dengan aktivitas-aktivitas sosial dan politik yang terus berkesinambungan esensi perjalanan Pemilu ditandai euphoria demokrasi ketika adanya pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu daerah atau pemilihan presiden secara langsung serta melibatkan partisipasi rakyat Indonesia secara langsung, adil dan bersama-sama. Hal ini sejalan apa yang dikemukakan Bivitri Susanti bahwa Pemilu, termasuk Pilkada adalah kuncinya demokrasi (sumber: <https://news.detik.com/berita/d-4788174/pakar-pilkada-langsung-itu-kunci-demokrasi>)

Kembalinya kuncinya demokrasi di era seperti reformasi sekarang ini, demokrasi di Indonesia berlangsung juga pada suatu wilayah yang dipetakan secara baru dengan istilah demokrasi di era digital. Yang dimaksud “demokrasi era digital”

adalah sebuah paradoks. Dimana batas antara membebaskan dan membelenggu begitu sumir. Batas antara mencerdaskan dan mendungukan begitu tipis. Platform digital seperti media sosial dan media online, serta mesin pencari (baca: search engine) memberikan banyak hal kepada kita: kemudahan berkomunikasi, semesta ide, dan wacana, sarana aktualisasi dan efisiensi dalam menjalankan berbagai aktivitas (Agus, 2019:354).

Internet telah membawa perubahan besar di segala aspek kehidupan masyarakat modern. hubungan sosial, perilaku politik, model bisnis, hingga praktik jurnalisme saat ini jauh berbeda dibandingkan dengan keadaan pada awal 2000-an. Keadaan situasi seperti ini ditengarai bermula dari mudahnya akses keterbukaan informasi menjadi salah satu kebutuhan utama aktivitas berdemokrasi pada era digital pada berbagai sendi kehidupan sosial dan politik pada masyarakat juga telah diatur kedalam undang-undang (sumber: UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Di era yang serba digital sedang menyongsong masyarakat industri berbasis 4.0, kemudian informasi menjadi sangat layak guna dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada sisi-sisi aktivitas manusia yang menarik untuk diikuti maupun sekedar diketahui. Berbagai hal yang ingin dibaca ada didalam beberapa kategori-kategori besar yang sudah sering kita ikuti di media-media massa didalamnya terdapat daring atau online pada jagat internet.

Termasuk didalamnya bagaimana media-media atau portal berita online membalut konstruksi sosial dan realitas pemilu serentak terhadap lahirnya pesan-pesan pada pemberitaan-pemberitaan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) dalam upaya mem-(*framing*) pembedaan masalah sosial dan masalah politik. Menurut Ashadi Siregar (Ari Cahyo Nugroho, 2012) memandang media online merupakan sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (baca; komputer dan internet). Didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-online, TV-online, pers online, mail-online, dan lain-lain dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan

user memanfaatkannya. Dari keterangan diatas maka dapat dikaitkan aktualitas suatu peristiwa-peristiwa berita jurnalisme pada muaranya diorganisir *cybermedia* secara runtut, terukur dan tak terhingga, artinya *knowledge* (pengetahuan) suatu realitas konstruksi sosial suatu peristiwa berita yang biasa disimpan dibenak individu, bisa disimpan di tempat lain melalui kemampuan teknologi komputer. Namun media *online* itu pengertiannya bukanlah media cetak yang ditaruh di *online* lalu didiamkan saja, namun dikisahkan kembali tapi juga harus di-*update* (Ninok Leksono, Kompas; 1995).

Disisi yang lain, telah dikemukakan oleh Shoemaker dan Reese (dalam Prisgunanto jurnal PTIK) ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi media dalam mengkonstruksi realitas yaitu: level individu, rutinitas media, organisasi, ekstramedia dan ideologi, dimana keduanya saling melengkapi. Adanya faktor-faktor tersebut, akhirnya mempengaruhi berita yang disajikan. Sehingga terdapat anggapan bahwa fakta yang disampaikan bukanlah fakta yang objektif, melainkan fakta tersebut telah dikonstruksi oleh media massa atau wartawannya sebagai penulis.

Media-media massa *online* sebagai hasil konstruksi berupaya menyeragamkan realitas politik, termasuk pemberitaan-pemberitaan Pemilu serentak. Seperti yang diketahui bersama bahwa pemberitaan-pemberitaan mencakup pula terhadap pemberitaan POLRI akan persiapan dan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019. Media massa dan Polri adalah sebagaiperwujudan manifestasi cerminan daripada instrumen-instrumen dari sistem demokrasi yang serba digital itu sendiri, bukanlah tanpa sebabdipengaruhi secara simultan akan dampak perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi itu sendiri yang pesat terhadap arus keterbukaan informasi.

Ditandai kemunculan berkembangnya internet yang kemudian beralih fungsi kepada sarana penyampaian isi pesan beritanya pun kini lebih praktis melalui saluran media-media *online*. Dari keterangan diatas maka dapat dikaitkan aktualitas suatu peristiwa-peristiwa berita jurnalisme pada muaranya diorganisir *cybermedia* secara runtut,

terukur dan tak terhingga, artinya *knowledge* (pengetahuan) suatu realitas konstruksi sosial suatu peristiwa berita yang biasa disimpan dibenak individu, bisa disimpan di tempat lain melalui kemampuan teknologi komputer.

Menurut Blumler dan Gurevitch (1975: 17-177), ada empat kerangka dasar yang ditawarkan berkaitan dengan peran media massa dalam politik, yaitu: Pertama, tingkat pengawasan negara pada organisasi media massa. Dalam hal ini negara dianggap memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap media massa. Segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara adalah kebijakan yang harus diikuti dan didukung oleh semua media massa yang ada serta beroperasi di negara tersebut. Kedua, tingkat partisipasi media massa. Bahwa media massa termasuk didalamnya media pemberitaan *online* juga dapat memberikan dukungan maupun loyalitasnya terhadap negara atau partai politik yang berkuasa pada saat itu. Dimensi ini menjelaskan bahwa komitmen media massa bersifat partisipan. Ketiga, tingkat integrasi media massa pada elite politik. Saat ini, media mengalami dinamika luar biasa, baik dalam hal ragam konten, saluran distribusi, khalayak, maupun cara untuk memperoleh pemasukan (Wendratama, 2017).

Dari keterangan diatas, merujuk pada komitmen bersama kedalam dimensi media-media *online* yang mengalami dinamika luar biasa, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam seputar ragam konten apa sajakah terhadap isu dan isi pesan yang kerap dilontarkan dan akan dikisahkan kembali oleh media-media *online* terhadap aktivitas-aktivitas POLRI dalam mengkonstruksi isu dan isi pemberitaan. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan POLRI dalam menghadapi perhelatan akbar pemilu serentak di media-media di Indonesia dari perspektif kajian analisis isi (*framing*)? Tema-tema berita menarik seperti apa sajakah yang kerap dilontarkan media *online* di era demokrasi digital terkait pemberitaan Polri menghadapi pemilu Serentak kurun waktu tahun 2018-2019? Tantangan-tantangan apa sajakah yang harus dicermati dan dievaluasi kembali, utamanya bagi Humas Polri kedepannya?

LITERATUR DAN METODOLOGI

Masalah sosial merupakan suatu gejala (fenomena) sosial yang mempunyai dimensi atau aspek kajian yang sangat luas atau kompleks, dan dapat ditinjau dari berbagai perspektif (sudut pandang atau teori). Oleh karena itu banyak dijumpai beragam pengertian atau definisi tentang masalah sosial (*social problems*) yang dikemukakan oleh para ahli. maka dapat diambil inti sari kesimpulan bahwa gejala-gejala yang tampak dalam suatu kehidupan bisa diartikulasikan sebagai masalah-masalah sosial (*social problems*) adalah apabila dan jika: (1) Apapun yang dilakukan oleh seseorang baik itu telah melanggar ataupun tidaklah sesuai dengan nilai-norma yang dijunjung tinggi oleh kelompok; (2) apapun yang dilakukan individu atau kelompok itu telah atau jika menyebabkan terjadinya disintegrasi kehidupan dalam kelompok; dan (3) sesuatu yang dilakukan individu atau kelompok itu telah memunculkan kegelisahan, ketidakbahagiaan individu lain dalam kelompok (Coleman, J.W and Cressey, D.R. 1984).

Sosiolog terkenal di Amerika Serikat, C. Wright Mills (1959) membahas masalah sosial dari perspektif sosiologis masalah sosial atau sering disebut dengan masalah kemasyarakatan, diantaranya: masalah korupsi, drainase kota, narkoba, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan, perjudian, perkosaan hingga anarkis (main hakim sendiri).

Menurut Deliar Noer (1983:6) “politik adalah ... segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat”. Hakekat politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti kekuasaan bukanlah hakekat politik, meskipun harus diakui tidak dapat dipisahkan dari politik, justru dalam pernyataannya tersebut politik memerlukannya agar suatu kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat. Deliar

Noer mengemukakan bahwa konsep politik tidak saja dilihat dari sudut perilaku, tapi melihat aspek sejarah yakni melihat dari perspektif sejarah bangsa Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan sampai sesudah kemerdekaan, di mana mempunyai konsep yang lebih luas. Politik tidak terbatas pada suatu kegiatan yang berkaitan dengan “*decision making*” (pengambilan keputusan) dan kebijaksanaan umum (*public policies*) seperti inti daripada konsep Miriam Budiardjo, akan tetapi mencakup tentang kegiatan-kegiatan yang bertujuan adanya perubahan-perubahan struktur masyarakat seperti adanya pergeseran kekuasaan politik dari penguasa atau rezim ke rezim lainnya.

Melihat definisi ini, maka hakekat politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti kekuasaan bukanlah hakekat politik, meskipun harus diakui tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik memerlukannya agar suatu kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat. Politik sebagai kegiatan dikemukakan Miriam Budiardjo (1982: 8) sebagai berikut: “pada umumnya dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu”.

Komunikasi Massa secara pengertian dan etimologis, berasal dari bahasa Latin “*Communicatio*”. Ini sangat mengadaptasi dari sumber perkataan “*Communis*” yang berarti sama. Sama baik itu sama makna atau sama arti. Jadi komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan (Effendy, 2004:30). *Mass communication* yaitu beragam komunikasi yang menggunakan begitu banyak ragam media massa, seperti media cetak dalam surat kabar, majalah, bahkan elektronik (radio, televisi, internet), yang tentunya dikelola oleh suatu lembaga yang ditujukan kepada sejumlah orang yang tersebar dibanyak tempat,

anonim, dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat dan serentak (Mulyana, 2005:75).

Realitas sosial merupakan hasil bangunan konstruksi sosial dalam suatu proses komunikasi. Realitas sosial membahas akan teori konstruksi sosial (*social construction*), membicarakan ini kita tentu saja tidak bisa melepaskan keberadaannya dari pijakan teoritik-teoritik yang telah dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann sebelumnya.

Awal pemikiran istilah konstruktivisme, lahir menjadi kajian konstruksi realitas sosial sehingga terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya yang berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociological of Knowledge* tahun 1966. Menurut keterangan yang didapat dalam sumber buku tersebut, bahwa realitas sosial adalah hasil suatu komunikasi yang dikonstruksi melalui beberapa proses diantaranya: eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Konstruksi sosial tidak berlangsung dalam ruang hampa, namun sarat dengan kepentingan-kepentingan (Bungin, 2008: 192).

Substansi teori konstruksi sosial pada suatu media massa adalah pada kedinamisan sirkulasi informasi yang cukup cepat serta meluas sehingga suatu bangunan konstruksi sosial berlangsung begitu cepat dan sebarannya bisa dikatakan merata yang pada akhirnya melahirkan beragam realitas-realitas. Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa, massa cenderung apriori dan opini massa cenderung sinis (Bungin, 2008: 203).

Pada kenyataannya, realitas sosial itu harus kokoh berdiri sendiri tanpa kehadiran individu apakah didalam maupun di luar realitas tersebut. Realitas sosial mempunyai banyak interpretasi makna, manakala realitas sosial dikonstruksi dan dimaknai secara subyektif oleh individu lain sehingga mampu menerangkan dan memantapkan realitas itu secara obyektif. Setiap individu-individu akan mengkonstruksi realitas sosial dan merekonstruksinya kembali sebagai representasi dalam satu dunia realitas, mampu memantapkan

realitas itu berdasarkan subjektivitas individu lain dalam institusi sosialnya. Dengan melalui berbagai konstruksi sosial media, maka akan jelas dapat diterangkan bagaimana suatu media massa melukiskan gambaran akan suatu realitas yang terjadi.

Konstruksi isi media yang memuat sejumlah masalah Pemilu Serentak akan memposisikan media pada level keberpihakannya terhadap kondisi sosial tertentu dari sistem sosial politik yang sedang berjalan. Ada pengharapan media yang mewakili sistem sosialnya dengan sebuah perubahan yang diagendakan oleh masyarakat, bentuk yang demikian merupakan representasi terhadap kebutuhan media sebagai indikator-indikator pada kondisi yang melatarbelakanginya.

Gagasan mengenai *framing*, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955 (Sobur, 2004: 161). Mulanya *frame* dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Tetapi akhir-akhir ini, konsep *framing* telah digunakan secara luas dalam literatur ilmu komunikasi untuk menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media. *Framing* secara sederhana adalah membingkai sebuah peristiwa. *Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang tersebut yang pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan bagian mana yang dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut (Sobur, 2004: 162). Membuat *frame* adalah menyeleksi beberapa aspek dari suatu pemahaman atas realitas dan membuatnya lebih menonjol dalam suatu teks yang dikomunikasikan sedemikian rupa hingga mempromosikan sebuah definisi permasalahan yang khusus, interpretasi kausal, evaluasi moral dan merekomendasi penanganannya (Entman, 1993:52).

Framing secara esensial, menurut Robert M. Entman meliputi penyeleksian dan penonjolan.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi frames adalah mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, memberikan penilaian moral dan menawarkan penyelesaian masalah dengan tujuan memberi penekanan tertentu terhadap apa yang diwacanakan. Definisi lain tentang *framing* dikemukakan oleh Gamson dan Modigliani. Mereka berpendapat bahwa *frame* adalah cara bercerita yang menghadirkan konstruksi makna atas peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana (Gamson dan Modigliani, 1989:3). (tabel 1).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologis analisisbersifat kualitatif dengan alasan karena realitas yang diteliti dipahami dengan pendekatan yang menyeluruh dan tidak melakukan pengukuran

dari bagian-bagian tertentu dari realitas tersebut , kemudian dikemas pada konteks *framing*. Untuk merumuskan kategori-kategori teks isi artikel yang berkaitan dengan masalah sosial dan politik tentang Pemilu serentak yang terkait institusi Polri. Dengan cara ini peneliti dapat mengetahui rekonstruksi dari perspektif narasumber (Glaser&Strauss 1967, Strauss&Corbin,1990). Dalam hal ini berita-berita yang dikeluarkan oleh portal maupun media berita *online*

Studi ini berusaha menganalisis bagaimana konstruksi realitas masalah sosial politik yang mempengaruhi prinsip-prinsip Kepolisian Republik Indonesia dalam mengantisipasi dan menghadapi penyelenggaraan pemilu secara serentak baik dikota maupun didaerah. Dalam penelitian ini penulis menerapkan analisis framing guna mengamati pembingkaiian Polri dalam

Tabel 1. Perangkat framing yang dikemukakan oleh William A Gamson dan Andre Modigliani

<u>Frame</u> Central organizing idea for making sense of relevant event, suggesting what is at issues	
<u>Framing Device</u> (perangkat Framing)	<u>Reasoning Device</u> (Perangkat Penalaran)
<u>Methaphors</u> Perumpamaan atau pengandaian	<u>Roots</u> Analisis kausal atau sebab akibat
<u>Catchphrases</u> Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Ini umumnya berupa jargon atau slogan.	<u>Appeals to Principle</u> Premis dasar, klaim klaim moral
<u>Exemplar</u> Mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (bisa berupa teori, perbandingan) yang memperjelas bingkai	<u>Consequences</u> Efek atau konsekuensi yang didapat dari Bingkai
<u>Depiction</u> Penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. Depiction ini umumnya berupa kosakata, leksikon untuk melabeli sesuatu.	
<u>Visual Image</u> Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa foto, kartun, ataupun grafik untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan.	

(Sumber : Diadopsi dari William A. Gamson dan Andre Modigliani, "*Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power A Constructionist Approach*", hlm .3, dalam Siahaan et al., 2001, hlm.87 dalam Sobur, hlm.177)

Tabel 2. Tema Sentral (Core Frame) Kategorisasi Pemberitaan Polri Dalam Menghadapi Pemilu Serentak (Media Online)

Tema-Tema Sentral	Netralitas TNI dan Polri	Strategi Polri	Antisipasi Polri	Partisipasi Masyarakat	Titik-titik Kerawanan (Hoaks, SARA, politik Identitas)	Hasil Kinerja dan Publikasi POLRI	Kepercayaan Masyarakat Meningkat	Tot
Jumlah Tema	8	6	5	4	5	3	4	35
Prosentase (pembulatan)	24 %	20%	15%	11%	12,5%	7,5%	10%	100%

(Sumber : Diolah Peneliti : Tema dari 35 (tiga puluh lima) Artikel-Artikel Pemberitaan Tentang POLRI berkaitan Pemilu, 2019)

berbagai isu pemberitaan dan tema-tema apa saja yang diusung oleh media dalam hal ini media online dalam membongkai permasalahan masalah sosial dan politik dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: studi dokumenter, yaitu data unit analisis dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data dari bahan-bahan tertulis pada yang memuat berita dan artikel-artikel lain yang berkaitan dengan masalah sosial, politik, demokrasi, Polri, Pemilu Serentak kurun waktu tahun 2018- hingga 2019. Berita-berita terkait tersebut kemudian selanjutnya dilakukan analisis *framing*.; Studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data melalui literatur dan sumber bacaan yang relevan dan mendukung penelitian. Dalam hal ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur serta tulisan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Maka dalam penelitian ini, analisis teks terhadap realitas artikel-artikel terkait pemberitaan Polri dalam menghadapi pemilu serentak sangat diperlukan guna mengangkat masalah sosial dan politik yang terjadi di Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu (pileg, pilkada dan, pilpres) yang penulis batasi sebagai objek khusus penelitian. Kategorisasi dipilih berkaitan dengan kompleksitas masalah sosial politik yang muncul didalam artikel berita terkait segala bentuk kegiatan

Polri dalam upaya penyelenggaraan pemilu sebagai ajang pesta demokrasi di Indonesia

TEMUAN DAN DISKUSI

Tema-Tema Sentral (Core Frame) Pada Judul Pemberitaan Polri Dalam Menghadapi Pemilu Serentak (Media Online antara tahun 2018-2019)

Tema sentral yang kerap dilontrakan media-media *online* terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 terdiri dari keterangan-keterangan diatas dari berbagai sumber yang dihimpun oleh peneliti sebanyak 35 (tiga puluh) lima artikel pilihan. Inilah yang dijadikan pijakan awal peneliti dalam mendedah isi pemberitaan serta membongkai permasalahan sosial politik terkait Pemilu 2019. Pemilihan tema yang menjadi sentral bukanlah berdasarkan judul berita melainkan tema-tema pesan yang diangkat oleh wartawan sebagai penulis dalam upaya memberitakan Polri dalam menghadapi Pemilu Serentak (Tabel 2).

Berdasarkan analisis *framing* model Gamson dan Modigliani dari keseluruhan berita (tabel 3), maka didapat hasil temuan pembongkai seperti pada tabel 4.

Tema sentral yang kerap dilontarkan media *online* terkait pemilu yang akan diadakan secara serentak yakni: berita-berita -topik utamanya yaitu terkait netralitas Polri sebagai suatu lembaga yang menjunjung tinggi independensi. Netralitas dapat diartikan sebagai suatu sikap tidak secara aktif

Tabel 3. Pemberitaan Polri Dalam Menghadapi Pemilu Serentak Pada Situs Laman Jejaring Internet

NO	NAMA MEDIA ONLINE	KATA KUNCI	TGL/TAHUN	JUDUL
1	KOMPAS.COM	STRATEGI POLRI	25-Sep-18	4 Strategi Polri Dalam Hadapi Pemilu 2019
2	TRIBUN.COM	STRATEGI POLRI	13-Sep-18	5 Strategi Polri Untuk Menjaga Kelancaran Pemilu 2019
3	cnnindonesia.com	ANTISIPASI POLRI	24-Sep 2018	Polisi Antisipasi Tiga Kejahatan Selama Kampanye Pilpres 2019
4	cnnindonesia.com	NETRALITAS- INDEPENDEN SI	25-Sept 2018	MUI Harap Polri Netral Dalam Pemilu-Pilpres 2019
5	bisnis.com	STRATEGI POLRI	08-Mei-18	Polri Susun Strategi untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019
6	beritasatu.com	STRATEGI POLRI	18-Sep-18	Ini Strategi Polri-TNI Amankan Pemilu 2019
7	mediaindonesia.com	STRATEGI POLRI	15-Okt-18	Polri Siapkan Langkah Straregis Amankan Pemilu 2019
8	poskotanews.com	PARTISIPASI MASYARAKA T	15-Nov-18	Peran Strategis Tokoh Agama dalam Menghadapi Pileg dan Pilpres 2019
9	merdeka.com	ANTISIPASI POLRI	13 Sept- 2018	TNI-Polri rapatkan barisan bahas pengamanan Pemilu 2019
10	polhukam.go.id	TITIK-TITIK KERAWANAN	02 Aug 2018	Jelang Pilpres dan Pileg 2019, Para Pemangku Kepentingan Inventarisasi Potensi Ancaman
11	tirto.id	TITIK-TITIK KERAWANAN	1 Oktober 2018	Modus Hoaks di Pemilu 2019 dan Upaya-Upaya Mengatasinya
12	kabarbaik.id	STRATEGI POLRI	24-Sep-18	Strategi Polisi Bikin Nyaman Warga Jelang Pileg dan Pilpres 2019
13	wartaekonomi.co.id	PARTISIPASI MASYARAKA T	19-Sep-18	Jelang Pileg dan Pilpres 2019, Waspadai Hoax dan Fitnah
14	tribratanews.polri.go.id	ANTISIPASI POLRI	12-Des-18	Jelang Pileg dan Pilpres 2019, Tim Asistensi Mabes Polri Lakukan Kunjungan ke Polda Gorontalo
15	neraca.go.id	NETRALITAS DAN INDEPENDEN SI	13-Sept- 2018	Pilpres 2019: Kerawanan, Ancaman dan Strategi Penanganannya
16	validnews.id	ANTISIPASI POLRI	26-Sep-18	Polri Antisipasi Kampanye Hitam Dalam Pemilu 2019
17	medanbisnisdaily.com	NETRALITAS- INDEPENDEN SI	24-jan- 2018	291 Personel TNI-Polri Geladi Pam Pemilu
18	detik.com	KEPERCAYA AN MASYARAKA T MENINGKAT	31-Jul-18	Polri Perkuat Fungsi Satgas Nusantara untuk Amankan Pilpres 2019
19	KOMPAS.COM	PARTISIPASI MASYARAKA T	18-Jul- 2018	Kapolri: Strategi Pengamanan Pemilu Paling Strategis adalah Kekompakan Semua Pihak
20	elshinta.com	ANTISIPASI POLRI	23-Nov- 2018	Antisipasi Polri hadapi kerawanan tahapan Pemilu 2019
21	tribunnews.com	NETRALITAS- INDEPENDEN	20-Sept- 2018	Ini yang Dilakukan TNI-Polri untuk Antisipasi Gangguan Kerawanan saat Pemilu 2019

		SI		
22	sindonews.com	KEPERCAYAAN MASYARAKAT MENINGKAT	26-Agust-2018	Pemilu 2019, TNI Antisipasi Potensi Gangguan Pihak Asing
23	kumparan.com	NETRALITAS-INDEPENDENSI	16-Jan-2019	272.880 Personel Gabungan TNI-Polri Amankan Pilpres dan Pileg 2019
24	kompas.com	NETRALITAS-INDEPENDENSI	01-Jan-2019	Kinerja Diawasi Masyarakat, Polri Diyakini Netral dalam Pemilu 2019
25	tempo.com	NETRALITAS-INDEPENDENSI	03-Feb-2019	Mabes Polri Minta Polisi Menahan Diri Sampai Pemilu 2019
26	detik.com	TITIK-TITIK KERAWANAN	02-Feb-019	Polri Sebut Solo Rawan Selama Pemilu, PDIP: Pelakunya Orang Luar
27	viva.com	TITIK-TITIK KERAWANAN	03-Feb-2019	Pemilu 2019, Empat Daerah Jadi Prioritas Pengamanan Polri
28	tribatanews.polri.go.id	NETRALITAS-INDEPENDENSI	02-Feb-2019	Dinilai Rawan Terjadi Konflik, Mabes Polri Pertebal Pengamanan Pemilu 2019 di Yogyakarta
29	tribunnews.com	HASIL KERJA DAN PUBLIKASI	03-Feb-2019	Hingga Awal Januari 2019, Polri Tangani 45 Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemilu
30	sinarharapan.com	TITIK-TITIK KERAWANAN	29-Feb-2019	Polri Waspada Kampanye Hitam di Pemilu Serentak 2019
31	sindonews.com	KEPERCAYAAN MASYARAKAT MENINGKAT	2 -Feb-2019	Pelibatan Masyarakat dan Publikasi Naikkan Kepercayaan terhadap Polri
32	faktualnews.com	HASIL KERJA DAN PUBLIKASI	08-Jan-2019	Pembuat Konten Hoaks Tujuh Kontainer Surat Suara Pemilu 2019 Tercoblos Dibekuk Polisi
33	tribatanews.polri.go.id	HASIL KERJA DAN PUBLIKASI	28-Jan-2018	Survei Polri, Lemkapi: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Meningkat
34	sindonews.com	PARTISIPASI MASYARAKAT	29-Jan-2019	Survei Puskaptis : Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2019 Tinggi
35	tribunnews.com	HASIL KERJA DAN PUBLIKASI	27-Mar-2019	Survei 'Kompas': Kepercayaan Masyarakat pada Polri Bawah Tito Terus Meningkat

(Diolah oleh Peneliti :

Judul Artikel Pemberitaan dari berbagai sumber media *online* selama kurun Tahun 2018-2019)

dan pasifmemberi dukungan pada kelompok/partai politik yang memiliki kepentingan dalam kemenangan pemilu. Dalam sejarah ketatanegaraan RI, sikap demikian ini disebut sebagai independensi Polri sebagai unsur dalam penegakan hukum. Pejabat Polri tidak boleh melakukan intervensi terhadap kasus yang ditanganibawahannya. Menurut Awaloedin Djamin, independensi atau

kemandirian Polri diartikan mandiri operasional dalam pembinaan. Selain itu, juga mandiri dalam arti cukup jumlah personil, kualitas profesionalisme, dan juga memperoleh kesejahteraan.

Sedangkan, menurut Teguh Soedarsono, bahwa netralitas Polri dalam Pemilu diargumentasikan sebagai berikut. Pertama, untuk memelihara, menjaga, dan mewujudkan profesionalitas

Tabel 4. Analisis framing model Gamson dan Modigliani dari keseluruhan berita.

Pembingkai		FRAMING MODEL Gamson dan Modigliani		
coreframe		Netralitas dan Independensi Polri dan TNI-ABRI Menghadapi Pemilu Serentak	Strategi dan Antisipasi Polri Menghadapi Pemilu Serentak	Partisipasi Rakyat Menghadapi Pemilu Serentak
Framing devices	metaphors	<p>Judul : MUI Harap Polri Netral Dalam Pemilu-Pilpres 2019 (sumber : CNN news) Khususnya kepolisian bersikap tegas dan adil selama tahap <u>Pemilu</u> dan <u>P ilpres 2019</u> berjalan. Hal itu penting karena juga mesti menegakkan hukum secara profesional dan transparan (25/9/2018).</p>	<p>Judul : 5 Strategi Polri Untuk Menjaga Kelancaran Pemilu 2019 (sumber: Tribunnews.com) "Lima strategi tersebut pertama adalah operasi Mantap Brata 2018 yang dikhususkan untuk pengamanan pemilu, kedua strategi Pro-Active Preventif untuk mencegah tindakan-tindakan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemilu," ucap Dedi di lokasi, Kamis (13/9/2018).</p>	<p>Judul : Kapolri: Strategi Pengamanan Pemilu Paling Strategis adalah Kekompakan Semua Pihak Tito berharap semua pihak, baik TNI-Polri, penyelenggara pemilu, dan semua pihak bergerak kompak agar pemilu berjalan damai. (28/9/2018).</p>
	catchphrases	<p>Wakil Ketua Umum <u>Majelis Ulama Indonesia</u> (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi meminta aparat penegak hukum, khususnya kepolisian bersikap tegas dan adil selama tahap <u>Pemilu</u> dan <u>P ilpres 2019</u> berjalan. Hal itu penting karena juga mesti menegakkan hukum secara profesional dan transparan.</p>	<p>Untuk menangani masalah dan mencegah potensi terjadinya ancaman tersebut, Polri telah menyiapkan lima strategi untuk menanggulangi-nya.</p>	<p>Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, institusi Polri menjadi tumpuan masyarakat untuk menjadi motor agar menciptakan Pemilu Serentak 2019 yang sehat, kompetitif, dan aman.</p>
	Exemplars	<p>Kepolisian Republik Indonesia, memiliki tugas penting yang cukup berat untuk mengamankan jalannya <u>Pemilu 2019</u></p>	<p>Hal itu dikatakan Tito saat menyampaikan amanah kepada personel gabungan TNI-Polri dalam rangka Pengamanan Penyelenggara Pemilu Tahun 2019, Selasa (18/9/2018). Pengamanan pemilu ini diberi nama sandi "Mantap Brata" 2018.</p>	<p>Hal itu dikatakan Tito saat menyampaikan amanah kepada personel gabungan TNI-Polri dalam rangka Pengamanan Penyelenggara Pemilu Tahun 2019, Selasa (18/9/2018). Pengamanan pemilu ini diberi nama sandi "Mantap Brata" 2018.</p>

Depictions	Penegakan hukum harus dilakukan kepada siapa pun tanpa membedakan warna partainya, sehingga masyarakat mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam menunaikan hak-hak konstitusionalnya," ucap Zainut melalui siaran pers, Selasa (25/9).	Meski masa kampanye baru akan dimulai pada bulan Oktober 2018 mendatang, namun saat ini sudah muncul berbagai masalah seperti adanya daftar pemilih ganda dan juga lainnya.	Strategi kita yang paling utama adalah semua unsur terkait dalam pelaksanaan ini (pengamanan Pemilu 2019) harus bersinergi, baik KPU, Bawaslu, kontestan, partai pendukung, massa pendukung, Polri-TNI, pemerintah daerah, media, tokoh masyarakat ini harus kompak," tutur mantan Kapolda Papua ini
Visual Images	Peserta pemilu juga mesti menjauhkan praktik politik yang kotor seperti kampanye hitam, provokasi, intimidasi, ujaran kebencian, dan hoaks. Selain itu, fitnah, politik uang, dan ujaran bernuansa suku, agama, ras, antar golongan (SARA) juga harus dihindari."	Potensi ancaman seperti protes, unjuk rasa, bentrokan antar kedua kubu, sabotase, <i>black campign</i> dan money politic, dikhawatirkan terjadi dan juga mengganggu kelancaran Pemilu	Apapun risikonya Pemilu 2019 berlangsung aman, damai, lancar, kompetensi sehat dan tidak boleh mengorbakan konflik yang menyebabkan perpecahan dan kesatuan bangsa serta bagi Polri NKRI harga mati," sambung Tito.
Roots	Kepolisian Republik Indonesia, memiliki tugas penting yang cukup berat untuk mengamankan jalannya Pemilu 2019 Agar dapat terselenggara pemilu yang tertib, aman, damai, dan bermartabat," ujar Zainut.	Menurut Zainut, hal itu mesti dipegang teguh oleh kepolisian selama menjalankan tugas dan fungsinya di masa kampanye. Dengan demikian, lanjutnya, masyarakat benar-benar dapat menyalurkan aspirasi politiknya tanpa takut mendapat ancaman atau intimidasi.	"Kunci keberhasilan itu adalah soliditas dan sinergitas. Saya dan Kapolri sangat bangga dengan kalian semua telah menunjukkan soliditas dan sinergitas di lapangan,"kata Hadi.
Appeal to principle	Penegakan Hukum	Strategi Operasi Mantap Brata	Partisipasi Semua Unsur/Elemen Masyarakat
Netralitas, Soliditas dan Sinergitas Polri Sebagai Bentuk Penegakan Hukum Melalui Strategi Operasi Mantap Brata Menghadapi Pemilu Serentak Yang Melibatkan Semua Elemen Masyarakat			

Keterangan: Pembingkai (Framing) Polri Dalam Menghadapi Pemilu Serentak (diolah oleh : Peneliti , 2019).

dan proporsionalitas dalam kerja Polri secara perorangan maupun kelembagaan diperlukan kearifan dan kelegowoan dari berbagai pihak dalam Polri melakukan penundaan dan atau tidak menggunakan hak-hak politiknya (hak memilih) tanpa harus kehilangan hak-haknya sebagai

anggota masyarakat, anak bangsa, maupun sebagai warga negara Indonesia untuk mendapatkan "hak dipilih". Sebab, dengan adanya hak memilih dan dipilih itu berarti warga negara ikut andil dalam menentukan kebijakan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 Ayat (2) *International Covenant*

on *Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang menyatakan bahwa: “Walaupun dalam Pemilu hakmemilih merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia, namun hak tersebut bukan merupakan *underogable rights*”. Artinya agar netralitas Polri dapat dikembangkan, maka diperlukan suatu reformasi kebijakan di tubuh Polri, dengan berupaya meningkatkan kualitas SDM Polri melalui pendidikan dan jaminan kesejahteraan yang semakin meningkat tanpa mengurangi hak-hak politik mereka.

Netralitas Polri Kunci Keberhasilan Pemilu (2019)

Dalam berbagai pemberitaan-pemberitaan yang dilayangkan kepada publik pada media online dalam kurun waktu tahun 2018-2019 yang sangat terasa dan mengemuka yaitu tentang pemberitaan terkait: “netralitas POLRI juga netralitas TNI dan soliditas keduanya” sebagai alat negara atau sebagai pengawas dan penengah dalam sistem kekuasaan negara yang mampu meredam segala bentuk konflik yang kemungkinan yang bakal terjadi didalam masyarakat dalam pesta perhelatan Pilkada, Pileg dan Pilpres kurun waktu 5 (lima) tahunan dari segi keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Media-media *online* yang ada dijagad maya dunia maya memberitakan bahwa apa yang dilakukan Polri menjunjung netralitasnya atau ketidakberpihakannya terhadap suatu lembaga, suatu organisasi maupun suatu partai politik apalagi keberpihakannya terhadap kelompok, komunitas serta individu.

Polisi dan politik adalah dua peran, dengan fungsi yang saling bertolak belakang, idealnya bagi masyarakat yang demokratis. Peran polisi adalah sebagai penjaga keamanan atau dalam bahasa Indonesianya lebih kepada “Kamtibmas”. Ketika polisi juga harus masuk dalam permainan politik, maka yang niscaya terjadi adalah distorsi, kesemrawutan, intrik serta kekacauan (*chaos*) dalam sistem negara. Hal tersebut telah Sejarah membuktikannya dan menyatakan bahwa sejak

berakhirnya zaman penjajahan Belanda ke Jepang kemudian beralih ke Republik kala itu, Polisi diberikan wewenang penuh untuk mengembangkan diri. Namun apa yang terjadi bahwa Soekanto yang kala itu sebagai orang pertama yang memimpin Kepolisian Indonesia musti terjungkal setelah empat belas tahun memimpin ini dikarenakan permainan politik, selanjutnya pada saat Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959 lebih-lebih pucuk pimpinan Polri berlomba-lomba untuk dekat dengan pusat kekuasaan, Akan tetapi kondisi ini sedikit tereleminir tatkala memasuki periode Orde Baru karena mulai dikembangkan model *merit system* yang mana dengan sistem ini penilaian Kapolri dilakukan oleh Wanjakti lalu di usulkan kepada Panglima ABRI (Pangab) serta penentu akhir adalah nasib ditentukan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Kejatuhan Order baru yang ditandai dengan gelora reformasi telah merubah sistem yang berkembang selama ini. Posisinya cenderung seperti memberikan suatu citra transisi terhadap Polri, penuh akan suatu ketidak-pastian. Disatu segi sisinya mengatakan sistem lama tidak digunakan atau dipakai kembali, disegi sisi yang lainnya sistem baru justru dikatakannya belum-lah jelas. Untuk mengatasi kerumitan yang terjadi maka pada Sidang Umum MPR Tahun 2000 mengeluarkan dua ketetapan sekaligus, yakni NO VI /TAP MPR /2000 dan NO VII / TAP MPR /2000 yang sepanjang menyangkut Polri TAP NO VII / TAP MPR /2000 ditetapkan :Pasal 10 Ayat (1) Polri bersikap netral dalam kehidupan Politik, ayat (2) Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, dan ayat (3) Anggota Polri dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Terkait TAP MPR diatas, dengan nyata serta dijelaskan bahwa ketetapan tersebut sudah merupakan ketentuan yang mengikat. Setidak-tidaknya polisi harus dibentengi dan tak sekedar dipagari dari penetrasi kekuatan politik. Pembentengan ini disamping diletakkan pada suatu sistem manajerial polri maupun administratif. Kesesuaian ketetapan diatas sangat mencerminkan

apa yang telah dikemukakan oleh Sir Robert Peel Bapak Kepolisian Britania Raya Inggris dengan tegas menyatakan : “ Polisi harus tahu politik, tapi tidak boleh berpolitik.” Dianalogikan tatkala polisi memasuki wilayah politik, maka sebenar-benarnya itu adalah titik lemah dari kemajuan, ketangguhan dan merongrong kewibawaan Kepolisian itu yang justru kian melemahkan sendi-sendi bernegara dan lambat laun membuat merosot situasi kamtibmas itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada ditambah juga landasan hukum yang memayunginya maka apa yang menjadi keniscayaan, bahwa Polri harus lepas dari segala bentuk politik praktis. Sikap netralitas Polri wajib bagi seluruh anggota Polri. Anggota Polri dilarang terlibat langsung dalam suatu politik praktis. Siapa pun yang melanggar, akan diberi sanksi. Sanksinya adalah disiplin dan kode etik Kepolisian. Maka dari hasil temuan framing peneliti dapat disimpulkan bahwa : netralitas, soliditas dan sinergitas Polri sebagai bentuk penegakan hukum melalui “Strategi Operasi Mantap Brata dalam menghadapi Pemilu Serentak yang melibatkan semua elemen masyarakat adalah kunci keberhasilan Polri.

Strategi-Antisipasi Polri Untuk Mengatasi Titik-Titik Kerawanan Menghadapi Pemilu Serentak 2019.

Berdasarkan temuan hasil penelitian diatas ini terdapat 7 (tujuh) tema atau kategorisasi-kategorisasi berita yang ditonjolkan dalam artikel-artikel pemberitaan diatas. Ketujuh isu tersebut menjadi *core frame* terhadap isu-isu yang diberitakan. Pembingkai Pemberitaan Polri dimedia online dalam menghadapi pemilu serentak” didalam artikel ini atas dasar “*kompleksitas masalah sosial dan politik dalam suatu sistem demokrasi*”

Dari hasil pembingkai strategi-antisipasi Polri bahwa kata kunci dalam sebuah peristiwa pemungutan suara / Pemilu dinegara yang menganut sistem demokrasi adalah adanya kebersamaan komitmen antara *share holder* dan *stake holder politik*. Selain daripada itu juga adanya sarana dan prasarana, regulasi serta bentuk

partisipasi masyarakat yang erat kaitannya dengan pemilu serentak tersebut. Didalam undang-undang bahwa Polri telah diamanatkan sebagai penanggung jawab keamanan serta mengawal tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Oleh karenanya dalam suatu pengamanan negara dalam upaya menjaga kamtibmas. Polri harus sigap melakukan strategi melalui berbagai aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dijalani Polri, seperti: kegiatan preventif, represif dan persuasif. Dalam erat kaitannya dengan penyelenggara Pemilu Polri menggelar bentuk operasi-operasi dengan kata sandi “**Mantap Brata 2019**”. Adapun Polri segera membentuk beragam satuan tugas, diantaranya: **Satgas Nusantara, Satgas Politik Uang, Satgas KKB (kelompok kriminal bersenjata)** diwilayah Papua yang rawan akan titik-titik konflik. Terkait masalah sosialantisipasi Polri melakukan deteksi aksi dari segala bentuk potensi kerawanan yang kemudian hari akan muncul dalam setiap tahapan Pemilu jelang berakhirnya seperti : bagaimana mengantisipasi terkait berita : “*ujaran kebencian, Hoax, fitnah, black campaign dan politisasi SARA, isu TKA China, kebangkitan komunis dan lain-lain*”. Terkait perkembangan politik Polri melakukan deteksi aksi yang berimplikasi terhadap bentuk stabilitas keamanan mendinginkan situasi antara yang pro dan kontra dengan melibatkan partisipasi masyarakat (para tokoh-tokoh masyarakat, agama dan tokoh adat setempat). Prinsipnya adalah Polri melakukan strategi pemolisian dalam memberdayakan masyarakat untuk mengelola kamtibmas secara swakarsa.

Adapun cara-cara yang dilakukan Polri sebagai strategi aksi dan antisipasi deteksi dini dengan mengadakan simulasi pengamanan Pemilu 2019. Ini sejalan dengan apa yang telah dikatakan oleh Wakil Kepala Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto (sumber :<https://tirto.id/daftar-tahapan-polri-antisipasi-kerawanan-di-pemilu-2019-cYYa>.) bahwa ada tahapan pengamanan dilapangan untuk mengantisipasi titik-titik kerawanan. Tahap awal pengamanan yang dilakukan Polri diawali: himbuan dan negosiasi. Polri tidak langsung bertindak represif jika terdapat indikasi adanya

kerawanan sehingga harus dibubarkan, maka Polri akan melakukannya. Dalam hal ini Polri mengkategorikan titik-titik tersebut menjadi titik: 'aman', 'agak rawan, hingga 'rawan'.

SIMPULAN

Secara garis besar pemberitaan-pemberitaan di media-media *online* terhadap institusi Polri membongkai masalah sosial dan politiknya dari sisi: aktivitas manusia berupa kegiatan dan sikap manusianya baik aktivitas secara internal maupun eksternal. Polri dinyatakan adalah bagian daripada instrumen suatu sistem kerja pada dalam demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatan dibongkai keterkaitannya dalam hal penyelenggaraan hingga pada tahapan-tahapan kegiatan pelaksanaan pemilu serentak itu sendiri, salah satunya : strategi operasi Mantap Brata. Dalam setiap artikel pemberitaan, media-media *online* berupaya menggambarkan bahwa pemilu dan polisi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kerangka masalah-masalah sosial maupun dalam kerangka masalah-masalah politik. Didalam pemberitaan-pemberitaan terdapat 7 (tujuh) tema-tema kategorisasi pemberitaan, utamanya ialah sikap dan netralitas Polri yang dipandang sebagai *core frame* bahwa independensinya dengan TNI dikonstruksikan sebagai mitra pengawas serta digambarkan berjalan lancarnya sistem kemitraan didalam koridor demokrasi sebagai upaya pengamanan merupakan instrumen dan indikator kuat suksesnya pemilu serentak (Pilkada, Pileg, Pilpres) di tahun 2018-2019. Hal ini pun tidak bisaterwujud begitu saja tanpa adanya keterlibatan partisipasi masyarakat dengan menggandeng segala unsur-unsur didalamnya, dimulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat setempat, para awak jurnalisisme (termasuk didalamnya mereka yang berkecimpung media-media *online*), LSM (lembaga swadaya masyarakat), Lembaga Pemilu, Bawaslu, KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan lembaga lain-lainnya yang terkait sebagai instrumen *condensing symbol*. (simbol-simbol makna yang dimampatkan).

Strategi dan antisipasi Polri dapat dideteksi

sertaditemukan dari berbagai masalah topik kategori-kategori kompleksitas masalah sosial dan politik pada sistem demokrasi yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu serentak. Dari hasil pembongkai analisis *framing* strategi-antisipasi Polri sangat berkiblat menganut sistem demokrasi akan kebersamaan komitmen antara *share holder* dan *stake holder politik*. Selain itu juga adanya sarana dan prasarana, regulasi hukum serta bentuk partisipasi masyarakat yang disinyalir menjadi salah faktor dan indikator tambahan yang juga penting. Bentuk-bentuk keberhasilan Polri sebagai hasil kinerja Polri, dikonstruksikan pula dalam pemberitaan-pemberitaan. Semakin hasil kinerja dan publikasi dilakukan secara berkala maka semakin lama masyarakat semakin memahami apa-apa saja aktivitas dan kegiatan yang dilakukan. Dikarenakan hal ini dinilainya merupakan buah kerja keras dan keberhasilan mengungkap suatu kasus bagian daripada transparansi Polri yang patut diacungi jempol sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan melibatkan elemen masyarakat. Inilah tantangan yang harus dijawab Humas Polri kedepannya guna mendapatkan tempat dan kepercayaan didalam kehidupan sosial politik didalam bermasyarakat justru harus melibatkan berbagai elemen-elemen didalam masyarakat, mempublikasikan hasil kinerja selama melaksanakan tugas. Inilah yang menjadi tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Humas Polri sekarang dan dimasa yang akan datang memasuki era *cybermedia* (era digital)

Hendaknya bagi media massa, khususnya media *online* kedepannya semakin hari semakin pro aktif memerankan fungsinya dalam menyediakan berbagai isi (konten) bagi para redaktur serta penulisnya yaitu wartawan agar masyarakat semakin cerdas dalam literasi informasi dan media dan elegan dalam menyikapi wacana masalah sosial dan politik secara kritis, khususnya terhadap pemberitaan pemilu-pemilu kedepannya dan yang paling penting saling mendukung dan menunjang serta bersahabat dengan institusi Polri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Strauss and J. Corbin. (1990). *Qualitative*

- Research; Grounded Theory Procedure and Techniques*. London: Sage Publication.
- Budiardjo, Miriam. (1982). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Bungin, Burhan. (2008). *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, Burhan. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial; Format-format kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya : Universitas Airlangga Press.
- Coleman, J.W and Cressey, D.R. (1984). *Social Problems*, Second edition. Harper & Row Publishers. New York
- Efendy, Onong Uchana. (2005). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung:Remaja Rosda Karya
- Entman, Robert N. (1993). Framing Towards Clarification of a Fracture Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4).
- Gamson, William A. and Andre Modigliani. (1989). "Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power A Constructionist Approach". *Journal of Sociology*, 95(1).
- Mulyana, Deddy. (2005). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Noer, Deliar. (1983). *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta : Rajawali.
- Nugroho, Ari Cahyo. (2012), Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisis Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com ON (*Framming Analysis Of News In Tribunnews.com*), *Jurnal BPPKI Jakarta, Badan Litbang SDM Kementrian Kominfo*, 16 (1).
- Prisgunanto, Ilham. (2018). Kemampuan Cyber Digital pada Muatan Pendidikan Polri guna Menghadapi Konstelasi Keamanan GlobalReformasi Polri yang Berkelanjutan. Jakarta: Mulia Angkasa.
- Jurnal Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK*, 25 (12)
- Priyadi, Catur. (2014) Agenda Media Mengenai Pilpres PEMILU 2014 Analisis Isi Terhadap Pemberitaan Mengenai Setatus Pencalonan Jokowi Dalam Surat Kabar Kompas. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 19 (3) .
- Rizky, Muhammad. (2012). Analisis Framing Berita Penertiban Mini Market Ilegal Pada Surat Kabar Poskota dan Indopos, *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 9 (2).
- Sartika, Rita. (2012). Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, Universitas Gajah Mada. *Proceeding Universitas Gajah Mada*
- Sobur, Alex. (2004). *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung: Rosda Karya.
- Soedarsono, Teguh. (2010). Netralitas Polri Dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal UII*, 13(2)
- Sudibyo, Agus. (2019), *Jagat Digital : Pembebasan dan Penguasaan, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)*, Gedung Kompas Gramedia, Jakarta
- Toni, Ahmad, Jati, Rocky Prasetyo. (2013). Diskursus Koruptor Dalam Media Massa : (Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Karakter Koruptor Kader Partai Di Kompas Online 'kompas.com'). *Jurnal Komunikasi Universitas Budi Luhur*, 18 (1)
- Wendratama, E. (2017). *Jurnalisme Online*. Yogyakarta: B First